

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penulisan Terdahulu

Penulisan terdahulu merupakan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui kebenarannya untuk dijadikan acuan dalam melakukan penulisan. Adapun penulisan terdahulu yang berkaitan dengan resiliensi yaitu sebagai berikut:

1. Indryaty Permatasari Umar (2017), Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, KIA STKS Bandung.

Penulisan ini dilakukan oleh Indryaty Permatasari Umar pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai mengenai tingkat resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir yang meliputi aspek tata pemerintahan, pengkajian risiko bencana, pengetahuan dan pendidikan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Metode survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penulisan ini. Jumlah responden dalam penulisan ini sebanyak 54 Kepala Keluarga yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penulisan ini menunjukkan tata pemerintahan menunjukkan kategori sedang, pengkajian risiko bencana pada kategori sedang. Pengetahuan dan Pendidikan pada kategori sedang, dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana pada kategori sedang.

2. Muhammad Faris Ghazi (2019), Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana Kekeringan di DESA Nangela Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, KIA STKS Bandung.

Penulisan ini dilakukan oleh Muhammad Faris Ghazi pada tahun 2019 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai resiliensi masyarakat terhadap bencana kekeringan di Desa Nangela, Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi. Adapun aspek resiliensi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu kondisi spiritual, kognitif, sosial, emosi, dan fisik. Metode deskriptif kuantitatif dengan teknik penarikan sample menggunakan table bilangan *random* dengan responden dalam penulisan ini adalah 91 kepala keluarga yang berdomisili di Desa Nangela. Uji validitas penulisan ini menggunakan validitas Instruk dan uji realibilitas menggunakan *cronbach's alpha*. Hasil penulisan mengenai resiliensi masyarakat terhadap bencana kekeringan di Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi berada pada kategori tinggi. Namun, jika melihat resiliensi berdasarkan tiap aspek yaitu aspek spiritual berada pada kategori sedang, dan aspek fsiik berada pada kategori sedang.

3. Trieshna Ameilya (2021), Resiliensi Masyarakat Terdampak Bencana Trusnami di Desa Cigondrong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, KIA STKS Bandung.

Penulisan ini dilakukan oleh Trieshna Ameilya pada tahun 2021 untuk mengetahui resiliensi masyarakat terdampak bencana tsunami di Desa Cigondrong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Pendekatan kuantitatif

dengan metode deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun responden dalam penulisan ini sebanyak 85 responden berusia 18-60 tahun yang diperoleh melalui teknik penarikan sample *Simple Random Sampling* terhadap 551 KK masyarakat Desa Cigondrong. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan studi dokumentasi dengan uji validitas alat ukur menggunakan validitas muka (*face validity*).

Hasil penulisan menunjukkan bahwa resiliensi masyarakat terhadap bencana *tsunami* di Desa Cigondrong pada umumnya berada pada kategori tinggi kecuali aspek emosi yang berada pada kategori sedang. Hal ini karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mempunyai regulasi emosi yang stabil, seperti dalam pengendalian rasa marah, takut, dan panik. Tingginya kepanikan masyarakat terhadap situasi-situasi yang dianggap sebagai tanda-tanda bencana melatarbelakangi penulis untuk mengajukan program “Kampung Cigondrong Siaga Bencana”. Program ini bertujuan untuk mengatasi kepanikan masyarakat sehingga masyarakat Desa Cigondrong dapat memulihkan kondisi pasca mengalami bencana *tsunami* yang terjadi pada akhir tahun 2018 lalu, dan meningkatkan serta menjaga stabilitas aspek-aspek resiliensi dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di masa mendatang.

Penulisan-penelitian terdahulu diatas merupakan penulisan yang mengambil variabel mengenai resiliensi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi penulisan-penulisan tersebut sama-sama mencari tahu mengenai bagaimana resiliensi individu setelah mengalami situasi yang sulit. Adapun persamaan dan

perbedaan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penulisan Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penulisan	Persamaan	Perbedaan
1.	Indryaty Permatasari Umar	Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	1) Variable yang digunakan Resiliensi 2) Teknik pengambilan sample adalah <i>simply random sampling</i> 3) Metode penelitian deskriptif kuantitatif	1) Aspek resiliensi yang digunakan berbeda 2) Target sasaran penulisan kepala keluarga 3) Focus masalah bencana banjir
2.	Muhammad Faris Ghazi	Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana Kekeringan di Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	1) Variable yang digunakan Resiliensi 2) Metode penulisan deskriptif kuantitatif	1) Penarikan sample menggunakan table bilangan <i>random</i> 2) Fokus masalah bencana kekeringan
3.	Trieshna Ameilya	Resiliensi Masyarakat Terdampak Bencana Tsunami di Desa Cigondrong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang	1) Variable yang digunakan Resiliensi 2) Teknik pengambilan sample adalah <i>simply random sampling</i>	1) Aspek resiliensi yang digunakan berbeda 2) Focus masalah bencana <i>tsunami</i>

2.2 Teori yang Relevan dengan Penulisan

2.2.1 Tinjauan Tentang Resiliensi

2.2.1.1 Pengertian Resiliensi

Resiliensi berasal dari kata “*resilio*” dalam bahasa latin yang berarti melambung kembali atau direfleksikan sebagai kemampuan individu dalam bertahan dan beradaptasi setelah mengalami kejadian yang sulit. Menurut Benard (1999) dalam Sri Mulyani Nasution (2011:3) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk bangkit setelah mengalami risiko yang tergolong parah. Adapun menurut Karen Reivich dan Andrew Shatte (2002) dalam Sri Mulyani Nasution (2011:3) mendefinisikan resiliensi sebagai berikut:

“resiliensi merupakan kemampuan individu untuk melakukan respon dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesulitan (*adversity*) atau trauma, dimana hal tersebut sangat penting untuk mengendalikan tekanan hidup sehari-hari”.

Menurut Grothberg (1999) dalam Sri Mulyani Nasution (2011:3) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, mendapatkan kekuatan dan dapat bertransformasi diri setelah mengalami kesulitan (*adversity*). Sedangkan menurut Handerson dan Milstein (2003) dalam Sri Mulyani Nasution (2011:11) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan manusia untuk bangkit dari pengalaman negatif bahkan menjadi lebih kuat selama menjalani proses pemulihan.

Berdasarkan beberapa definisi resiliensi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tersebut.

2.2.1.2 Aspek-Aspek Resiliensi

Reivich and Shatte dalam Sri Mulyani Nasution (2011:18-24) mengemukakan adanya tujuh faktor yang menjadi komponen atau aspek-aspek dari resiliensi yang terdapat dalam uraian berikut:

1. *Emotion Regulation* (Regulasi Emosi)

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang dibawah kondisi yang menekan. Kemampuan untuk tetap tenang ketika mengalami tekanan merupakan suatu hal yang penting untuk memahami emosi yang sedang dirasakan. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui fokus (*focusing*) dan ketenangan (*calming*) sehingga individu akan mendapatkan efek relaksasi dan mampu untuk mengendalikan emosi yang sedang dirasakan ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang menekan.

2. *Impulse Control* (Pengendalian Impuls)

Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu yang memiliki pengendalian impuls yang rendah akan cepat mengalami perubahan emosi ketika berhadapan dengan berbagai stimulasi dari lingkungan. Kemampuan individu dalam mengendalikan impuls sangat terkait dengan kemampuan regulasi emosi yang dimiliki.

3. *Optimism* (Optimis)

Individu yang resilien merupakan individu percaya bahwa dirinya mempunyai keyakinan akan segala sesuatu yang baik di masa depan atau

optimisme. Optimisme akan menjadi hal yang lebih baik bila diiringi dengan segala usaha untuk mewujudkan keyakinan akan hal baik tersebut.

4. *Causal Analysis* (Analisis Penyebab Masalah)

Analisis penyebab masalah merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga individu tersebut tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah dibuat. Individu yang memiliki kemampuan dalam menganalisis masalah mampu mengurai dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

5. *Empathy* (Empati)

Empati merupakan kemampuan yang cukup baik dalam mengartikan kondisi orang lain. Oleh karena itu, individu yang memiliki kemampuan berempati yang baik cenderung mempunyai hubungan sosial yang positif.

6. *Self Efficacy* (Efikasi Diri)

Efikasi diri merupakan keyakinan individu dalam memecahkan masalah yang dialami. Efikasi diri merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai resiliensi karena efikasi diri dapat menentukan sikap dan perilaku individu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan.

7. *Reaching Out* (Pencapaian)

Pencapaian merupakan kemampuan individu dalam memandang suatu masalah sebagai tantangan hidup bukan suatu ancaman yang harus dihindari sehingga individu tersebut dapat mencapai keberhasilan dengan beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.2.1.3 Fungsi Resiliensi

Reivich and Shatte (2002) dalam Sri Mulyani Nasution (2011:32) mengemukakan empat fungsi resiliensi, yaitu:

1. Mengatasi hambatan-hambatan pada masa kecil

Hambatan masa kecil dapat diatasi dengan kemampuan untuk tetap semangat, usaha keras, dapat mengendalikan diri, dan tetap fokus sebagaimana yang telah dikemukakan dalam aspek-aspek yang membangun resiliensi.

2. Melewati tantangan dalam kehidupan sehari-hari

Resiliensi dibutuhkan dalam kehidupan individu dalam menghadapi dan melewati berbagai tekanan, tantangan, dan menyelesaikan masalah dengan baik.

3. Bangkit kembali setelah mengalami kesulitan besar atau kejadian traumatik.

Individu yang memiliki pengalaman pahit dalam hidupnya dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan trauma sehingga resiliensi dibutuhkan agar individu dapat pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sebelum trauma.

4. Mencapai prestasi terbaik

Resiliensi dibutuhkan agar individu terus belajar, mencari pengalaman baru, mengatasi permasalahan yang dialami, pulih dari trauma, dan dapat bangkit setelah mengalami keadaan yang sulit.

2.2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Resiliensi

Grothbert (1999) dalam Wiwin Hendriani (2018 : 45) menyebutkan terdapat tiga sumber pembentukan resiliensi (*three success of resilience*) yaitu:

1. *I Have* (saya memiliki)

I have merupakan sumber resiliensi yang berhubungan dengan dukungan sosial yang diperoleh dari lingkungan sekitar yang ditentukan oleh:

1) Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan (*trust*)

Sumber resiliensi secara eksternal dapat diperoleh dari hubungan yang dilandasi dengan kepercayaan dari orang tua, teman, dan orang lain yang mengasahi dan berinteraksi dengan individu tersebut.

2) Struktur dan peraturan di lingkungan rumah

Struktur dan peraturan yang ada di lingkungan rumah dapat berupa rutinitas atau tugas-tugas dan aturan yang harus dipatuhi secara jelas oleh setiap anggota keluarga sehingga individu mengetahui batas-batas aktivitas dan akibat dari melanggar peraturan yang telah ditentukan.

3) Model-model peran (*role models*)

Teman sebaya, orang dewasa, dan orang tua merupakan media individu dalam berperilaku dengan mendorong individu untuk meniru hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

4) Dorongan seseorang untuk mandiri

Dorongan seseorang untuk mandiri didapatkan dari orang dewasa sekitar yang mendorong individu untuk berperilaku secara mandiri dengan cara mengarahkan untuk mencari bantuan apabila dibutuhkan dan mengapresiasi apabila individu tersebut telah bersikap mandiri.

5) Akses terhadap fasilitas seperti layanan keamanan, kesejahteraan, Pendidikan, dan kesehatan.

Individu memiliki akses yang tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan.

2. *I Am* (diri saya)

I am merupakan kekuatan individu yang mencakup keyakinan, sikap dan perasaan yang dipengaruhi oleh kualitas pribadi sebagai berikut:

- 1) Penilaian personal dengan memperoleh kasih sayang dan disukai oleh banyak orang

Individu yang merasa dicintai dan dikasihi oleh orang lain akan berperilaku menyenangkan dan baik terhadap orang yang mencintai dan mengasihinya.

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatur sikap terhadap respon yang orang lain berikan kepadanya.

- 2) Pedulil, empati, dan mencintai orang lain

Individu akan menunjukkan rasa peduli, mengasihi, serta mencintai orang lain dengan cara berperilaku maupun berucap.

- 3) Bangga dengan dirinya sendiri

Rasa bangga dan percaya diri merupakan bagian penting untuk membantu individu dalam mengatasi masalah dan mengembangkan *self esteem* yang telah dimiliki.

- 4) Tanggungjawab dan dapat menerima konsekuensi

Individu yang bertanggungjawab merupakan individu yang siap menerima konsekuensi apapun atas perilaku yang telah dilakukan.

- 5) Optimis, percaya diri dan memiliki harapan akan masa depan

3. *I Can* (saya mampu)

I can merupakan keyakinan akan kemampuan diri yang meliputi keterampilan sosial, interpersonal, dan menyelesaikan persoalan dengan sumber resiliensi sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berkomunikasi
- 2) Kemampuan memecahkan masalah atau *problem solving*
- 3) Kemampuan mengelola perasaan, emosi dan impuls-impus
- 4) Kemampuan mengukur emosi diri sendiri dan orang lain
- 5) Kemampuan menjalin hubungan yang penuh kepercayaan

2.2.1.5 Karakteristik Individu yang Resilien

Wagnild dan Young (2009) dalam Wiwin Hendriani (2018 : 49) mengemukakan terdapat lima karakteristik resiliensi yaitu:

1. Kegigihan

Kegigihan merupakan sikap individu yang selalu berjuang untuk dapat pulih dan bangkit dalam mengembalikan kondisinya semula.

2. Ketenangan

Ketenangan mengacu pada keseimbangan cara berpikir individu dalam memandang kejadian yang sedang terjadi dengan tetap optimis dan tetap tenang dalam mencari jalan keluar dan peluang dalam situasi yang sulit.

3. Kebermaknaan

Kebermaknaan merupakan kesadaran individu akan kehidupan yang sedang dijalani dan tujuan hidup yang dimiliki.

4. Ketahanan Diri

Individu yang memiliki ketahanan diri akan belajar dari pengalaman dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah.

5. Kesendirian Ekistensial

Kesendirian eksistensial merupakan kemampuan individu dalam mengatasi masalahnya sesulit apapun secara mandiri tanpa bergantung pada kemampuan orang lain.

2.2.1.6 Resiliensi Masyarakat

Resiliensi masyarakat dapat diartikan sebagai kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya individu secara kolektif dalam menghadapi, beradaptasi, berkembang dari berbagai tuntutan, tantangan dan perubahan yang dihadapi sebelum, selama dan setelah adanya bencana (Patel, Rogers, and Amlôt, 2017). Selain itu, resiliensi masyarakat diartikan sebagai kapasitas atau suatu proses masyarakat dalam beradaptasi dan menjaga keberfungsian ketika menghadapi gangguan atau bencana (Castleden, McKee and Murray, 2011). Resiliensi masyarakat dapat pula didefinisikan sebagai refleksi dari kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk bersama mengelola sumber dan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh bencana. Resiliensi masyarakat pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan masyarakat yang secara kolektif terdiri dari kondisi ketahanan individu, kelompok atau keluarga yang dibentuk oleh beberapa aspek diantaranya aspek spiritual, kognitif, emosi, spiritual dan fisik.

2.2.1.7 Faktor Resiliensi Masyarakat

Menurut Pfefferbaum, et al. (2007) dalam Wiwin Hendriani (2018:52) mengemukakan tujuh faktor resiliensi masyarakat yang terdapat dalam uraian berikut ini:

1. Keterhubungan, komitmen, dan nilai-nilai kebersamaan

Komitmen yang kuat di masyarakat akan mempengaruhi kekuatan hubungan dan nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki. Masyarakat yang dapat merangkul keragaman akan lebih mampu menangani kebutuhan masyarakat lain ketika mengalami situasi yang sulit.

2. Partisipasi

Partisipasi dapat memperkuat rasa memiliki di antara masyarakat ketika terlibat atau berkontribusi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Ketika partisipasi dianggap penting, masyarakat cenderung membantu masyarakat lain dalam mengatasi kebutuhan atas permasalahan yang dialami.

3. Struktur, peran, dan tanggungjawab

Interaksi secara berkala, dukungan dan kerjasama dengan individu maupun kelompok merupakan hal yang penting dalam resiliensi masyarakat. Adanya struktur, peran dan tanggungjawab memberikan aturan dan Batasan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sumber daya

Masyarakat dapat dikatakan resilien atau memiliki ketahanan apabila dapat memperoleh dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai yang menjadi tujuannya.

5. Dukungan dan pengasuhan

Masyarakat pendukung dan pengasuh hadir untuk membantu anggota dalam mencapai tujuan dan mengatasi masalah. Pada resiliensi masyarakat, mekanisme dukungan menyediakan bantuan kepada kelompok yang rentan sebelum, selama dan setelah terjadi bencana.

6. Pengembangan keahlian

Masyarakat yang resilien atau memiliki ketahanan harus dapat mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk kemudian membuat rencana, mengelola atau mengatur dan mengevaluasi kegiatan.

7. Komunikasi

Resiliensi masyarakat diperkuat oleh adanya komunikasi yang efektif, jelas, tepat waktu dan akurat sesama anggota dan melintas batas. Pada saat menghadapi bencana, harus ada komunikasi yang cukup untuk dapat memastikan mobilisasi sumber daya tepat waktu.

2.2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat

2.2.2.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang memiliki akal pikiran yang hidup di dunia dan memiliki keinginan untuk menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurut Maclever dan Page (2002) dalam Soejono Soekanto (2012:22) menyebutkan pengertian masyarakat yaitu,

“masyarakat ialah suatu system dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia”.

Menurut Ralph Linton (1999) dalam Soejono Soekanto (2012:22) menyebutkan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan menurut Selo Soemardjan (2006) dalam Soejono Soekanto (2012:22) menyebutkan bahwa masyarakat merupakan orang yang hidup bersama sehingga menghasilkan suatu kebudayaan.

Berdasarkan pengertian masyarakat menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang dapat menghasilkan kebudayaan dan norma-norma yang mengikat.

2.2.2.2 Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto dalam Gungsu Nurmansyah, dkk. (2019:53) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal dua orang/lebih
2. Anggotanya memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan
3. Berhubungan dengan waktu yang cukup lama dengan saling berkomunikasi dan membuat norma dan/atau aturan dalam bermasyarakat
4. Menghasilkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

2.2.2.3 Fungsi Masyarakat

Menurut Netting, dkk. (1998) dalam Edi Suharto (2014:124) menyebutkan fungsi-fungsi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi sosialisasi untuk mewariskan nilai, norma, dan tradisi yang dianus selama berinteraksi dalam masyarakat.
3. Fungsi partisipasi sosial untuk menampung aspirasi dan kepentingan untuk membangun kerja sama melalui interaksi dalam kelompok, mitra, dan organisasi.
4. Fungsi gotong royong atau timbal balik terhadap keluarga, teman, tetangga, kelompok sukarela, dan asosiasi profesional yang tergabung dalam masyarakat.

2.2.2.4 Kategori Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan dan beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya. Berikut kategori masyarakat berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat Modern

Menurut Selo Soemartjan (2010:205) masyarakat modern merupakan

“masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan sehingga mudah membawa ide-ide baru”

Masyarakat modern sudah tidak terikat pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organik karena masyarakat modern saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif yaitu hukum yang berfungsi untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau ke arah atau kembali normal.

2. Masyarakat Tradisional

Menurut Selo Soemarjan (2010:206) mengemukakan bahwa masyarakat tradisional merupakan,

“masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun temurun”

Keterikatan masyarakat tradisional dengan adat-istiadat menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional sehingga masyarakat tradisional dianggap kurang kritis. Masyarakat tradisional memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional menurut Selo Soemarjan (2010:208) diantaranya:

- 1) Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
- 2) Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
- 3) Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
- 4) Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
- 5) Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
- 6) Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
- 7) Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
- 8) Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan

Masyarakat tidak hanya dikategorikan berdasarkan sifat. Adapun kategori masyarakat berdasarkan lokasi atau tempat tinggal menurut Selo Soemarjan (2010:210) adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat Perkotaan

Menurut Selo Soemarjan (2010:210) mendefinisika masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut.

“Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang cenderung memiliki sifat individual dan heterogen dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih”.

Dalam masyarakat kota terdapat banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan profesi. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi dengan tingkat asosiasi yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak. Kontrol sosial di dalam masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial sangat tinggi. Masyarakat perkotaan lebih mengutamakan prestasi sehingga mobilitas sosial relatif tinggi. Asosiasi di dalam masyarakat perkotaan bersifat sukarela dan cenderung menganut individualisme karena adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan secara individu. Selain itu, masyarakat perkotaan cenderung memisahkan diri secara fisik berdasarkan perbedaan kelompok sosial

2. Masyarakat Desa

Menurut Soerjono Soekanto (2006:166) mendefinisikan masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut.

“masyarakat pedesaan adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.

Masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat *gradual* atau mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Setiap masyarakat desa memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu tipologi wilayah yang sama. Masing-masing masyarakat desa memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda, sehingga dengan mengkaji tipologi desa dapat digunakan sebagai dasar pada intervensi pembangunan yang seharusnya juga tidak diseragamkan untuk semua wilayah perdesaan. Pengelompokan masyarakat desa berdasarkan letak dan posisi geografis, terdiri atas:

1. Masyarakat Desa Pegunungan

Desa pegunungan berada pada daerah dengan lereng $> 40\%$, dan ketinggian > 500 meter diatas permukaan air laut. Dalam lingkup Daerah Aliran Sungai (DAS), desa-desa ini terletak di daerah hulu dan merupakan daerah konservasi dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*), ditandai adanya tanaman hutan atau tanaman tahunan lainnya. Desa pegunungan mempunyai curah hujan yang tinggi, serta potensi sumberdaya air yang cukup melimpah, oleh karena itu

masyarakat desa pegunungan seringkali memanfaatkan potensi sumberdaya alam khususnya tanaman perkebunan dan hortikultura potensial. Demikian pula masyarakat desa pegunungan seringkali melakukan pengembangan peternakan, seperti sapi perah, bertani, dan berkebun. Desa-desanya pegunungan selalu berasosiasi dengan letak gunung tertentu, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, sehingga sering berpotensi juga sebagai kawasan rawan bencana erupsi. Pola permukiman masyarakat desa pegunungan yaitu terpecah, kepadatan penduduknya rendah.

2. Masyarakat Desa Perbukitan

Morfologi desa perbukitan yaitu bergelombang dengan kemiringan dan ketinggian lebih rendah dari pegunungan, yaitu kurang lebih pada lereng 30% - 40 %, ketinggian antara 75 – 500 meter di atas permukaan laut. Potensi desa perbukitan tergantung pada struktur geologi dan materi dasar pembentuknya. Desa perbukitan dengan material dasar gamping dan karst, umumnya terjadi kelangkaan sumberdaya air dan kekeringan. Sedangkan desa perbukitan yang berbatu dasar material vulkanik dan pasir akan memiliki potensi sumberdaya air tinggi, sehingga memiliki potensi pengembangan lebih besar. Masyarakat desa perbukitan umumnya memiliki usaha kayu-kayuan dan tanaman tahunan serta perkebunan tergantung pada jenis tanah yang ada pada perbukitan.

3. Masyarakat Desa Dataran

Desa dataran merupakan desa paling luas dan banyak dijadikan tempat tinggal, sehingga kepadatan penduduk tinggi. Desa dataran berada pada wilayah datar, dengan ketinggian rendah, dan kemiringan kurang dari 15%. Biasanya berada di

daerah hilir dan selalu berasosiasi dengan keberadaan sunagi yang menjadi sumber kehidupan penduduk. Potensi air melimpah, sehingga daerah dataran banyak digunakan sebagai tempat permukiman, dan kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lain-lainnya. Masyarakat desa daratan sebagian besar dari luas wilayahnya digunakan sebagai kawasan budidaya, sawah, irigasi maupun tadah hujan, sehingga masyarakat desa daratan berperan sebagai penghasil pangan yang penting.

4. Masyarakat Desa Pesisir /Pantai.

Desa pesisir atau pantai adalah kelompok desa yang keberadaannya dipengaruhi oleh ekologi laut. Desa tipe ini secara geografis dapat berbatasan dengan laut, dapat pula tidak berbatasan dengan laut, namun lingkungannya dipengaruhi laut (zona pasang surut dan penyangga laut), kemiringan kurang dari 5% sehingga secara morfologi merupakan dataran. Potensi ekonomi desa pesisir dipengaruhi baik oleh perkembangan wilayah maupun morfologi dan bentuk pantai sehingga masyarakat desa pesisir memiliki potensi dan peluang ekonomi yang berkembang dengan menjual hasil tangkapan dari laut dan/atau pesisir.

5. Masyarakat Desa Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat desa ini berada di pulau-pulau kecil yang umumnya terpencil dan terpisah dari dataran luas oleh lautan yang luas. Kegiatan ekonomi potensial masyarakat desa pulau-pulau kecil adalah sektor perikanan kelautan dan ada juga yang dikembangkan sebagai daerah wisata. Namun, kendala utama pengembangan desa pulau kecil adalah keterisolasian, serta biaya tambahan sebagai konsekuensi kondisi geografis.

2.2.3 Tinjauan Tentang Bencana

2.2.3.1 Pengertian Bencana

Menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR-2002,24) dalam Nurjanah dkk. (2013:10) menyebutkan bahwa bencana adalah

“Suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya”.

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR dalam Nurjanah dkk. (2013:11) sebagaimana disebutkan diatas, terdapat beberapa kriteria/kondisi untuk dapat disebut bencana yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa;
2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
3. Terjadi kaerena tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (*slow*);
4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian social-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
5. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Menurut *World Health Organization* (2007) menyebutkan pengertian bencana yaitu,

“Bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak”.

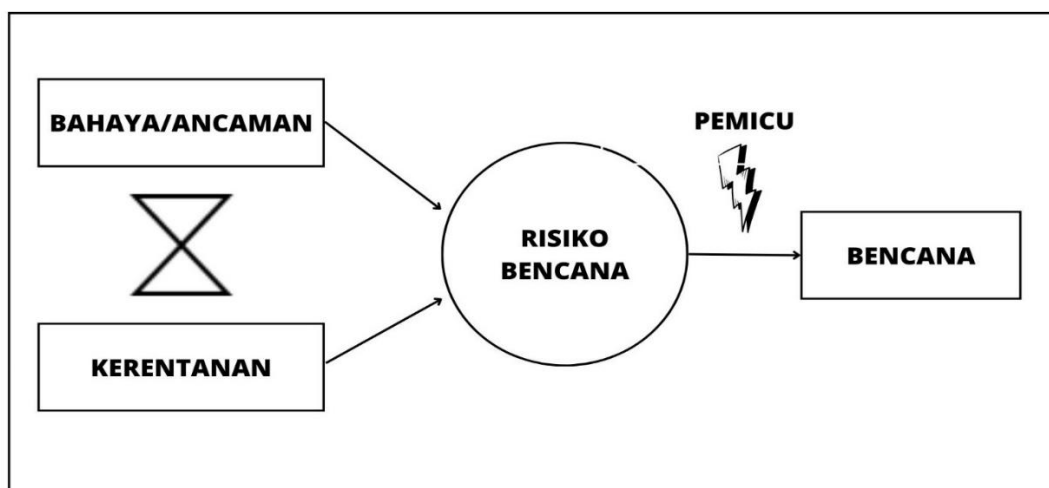
Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa,

“Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa peristiwa alam maupun non alam bisa bersifat tunggal atau bisa berupa rangkaian peristiwa dalam waktu hampir bersamaan.

2.2.3.2 Proses Terjadinya Bencana

Menurut Nurjanah dkk (2013:13-14) peristiwa alam maupun non alam dapat dikatakan sebagai bencana apabila manusia terkena dampak dan tidak mampu mengatasinya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia dalam bertindak. Berikut merupakan diagram proses terjadinya bencana.



Gambar 2. 1 Proses Terjadinya Bencana

Sumber: Nurjanah dkk. (2013) *Manajemen Bencana*

Melalui proses tersebut, diketahui bahwa bencana terjadi selama melalui proses dan memenuhi unsur-unsur atau kriteria. Adapun unsur-unsur yang dapat menimbulkan bencana yaitu sebagai berikut.

1. Bahaya (*Hazard*)

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya belum tentu mengakibatkan bencana. Bencana terjadi apabila bahaya berinteraksi. Inilah yang disebut insiden antara manusia, lingkungan, atau harta benda dengan bahaya (*hazard*) sehingga menimbulkan kerusakan. Api, air, angin, dan bumi merupakan jenis bahaya yang ada di sekitar kita. Bahaya dapat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti gempa bumi, tsunami, angin kencang, topan, gunung Meletus. Selain faktor alam, faktor manusia pun turut menjadi bahaya seperti konflik, perang, kebakaran pemukiman, wabah penyakit, kegagalan teknologi, pencemaran, terorisme. Faktor lainnya yakni faktor alam dan manusia dapat berupa seperti banjir, tanah longsor, kelaparan, kebakaran hutan dan kekeringan.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap bencana yakni tingkat kerentanan yang dimiliki karena bencana baru akan terjadi apabila “bahaya” terjadi pada “kondisi yang rentan”, seperti yang dikemukakan dalam Nurjanah dkk (2013:16) yaitu,

“... *Natural disaster are the interaction between natural hazards and vulnerable condition*”

Tingkat kerentanan dapat ditinjau berdasarkan kerentanan fisik (infrastruktur), ekonomi, dan sosial yang rawan terhadap factor bahaya (*hazard*) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi darat, rasio panjang jalan, jaringan indicator, jaringan pdam, dan jalan kereta api.

3. Risiko Bencana (*Disaster Risk*)

Menurut Nurjanah, dkk. (2013:25) risiko (*risk*) diartikan sebagai kemungkinan (*probabilty*) terjadinya bencana dan korban masal yang berkaitan dengan berbagai fenomena. Tingkat resiko bencana disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) atau *Disaster Risk Reduction* (DRR), ketiga faktor tersebut yang menjadi dasar acuan untuk dikaji guna menentukan langkah-langkah dalam pengelolaan bencana.

$$\text{RISIKO BENCANA (RB)} = \frac{\text{Bahaya (H) x Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$$

Berdasarkan rumus di atas, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana baik alam maupun buatan di suatu tempat, kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi ancaman, dan kapasitas merupakan kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, akan semakin besar pula risiko bencana yang dihadapi.

4. Kapasitas (*Capacity*)

Menurut Nurjanah, dkk. (2013:25) kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui tradisi budaya, gotong royong, kesiapan darurat, resiliensi dan kesiapsiagaan. Kemampuan ini dapat berupa mitigasi, pengurangan risiko, dan kesiapsiagaan. Adapun kategori kapasitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Fisik atau materi yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi dan materi yang memadai dapat bertahan lebih baik.
- 2) Sosial atau organisasi yang dapat membantu dalam menghadapi dan menangani ancaman yang ada.
- 3) Tingkah laku atau motivasi, yang berkaitan dengan kemampuan atau kepercayaan untuk menghadapi tantangan bencana alam.

Kapasitas ditentukan berdasarkan kesiapan dalam mitigasi dan langkah tanggap darurat untuk menangani potensi dan kejadian bencana. tingkat kesiapan dalam menghadapi bencana dapat diukur melalui pengetahuan, kelembagaan, mekanisme kerja dan sumber dayanya.

2.2.3.3 Jenis-Jenis Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis bencana yaitu bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, bencana non alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun kegagalan sistem, dan bencana sosial yang disebabkan oleh manusia.

2.2.3.4 Faktor Penyebab Bencana

Menurut Nurjanah dkk. (2013:18) Secara garis besar, terjadinya bencana dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor alam yang murni penyebab utamanya adalah alam itu sendiri
2. Faktor Perbuatan Manusia (*man made disaster*) yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti degradasi lingkungan, penggundulan hutan yang berakibat pada bencana kekeringan, erosi/banjir, dan penurunan tanah/lahan (amblesan) akibat pengembangan wilayah yang tidak berwawasan lingkungan.

2.2.3.5 Daerah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan daerah rawan bencana yaitu kondisi atau karakteristik wilayah yang dapat mengurangi kemampuan untuk menanggapi

dampak buruk dari bahaya tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah rawan bencana merupakan wilayah/kawasan yang memiliki potensi bencana, baik bencana alam, non alam, maupun manusia.

2.2.4 Tinjauan Bencana Gempa Bumi

2.2.4.1 Pengertian Bencana Gempa Bumi

Menurut Nurjanah dkk (2013:7) pengertian bencana gempa bumi yaitu

“gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran atau pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba”.

Penyebab gempa bumi yang selama ini disepakati akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, dan pergerakan geomorfologi secara lokal. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yang mana bila penanganan maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik, maka akan menimbulkan ancaman korban jiwa maupun kerugian materi. Adapun berbagai komponen yang terancam apabila terjadi gempa bumi diantaranya:

1. Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni.
2. Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan.
3. Bangunan dengan atap yang berat.
4. Bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah.
5. Bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/tidak kompak.
6. Bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil.
7. Infrastruktur diatas tanah atau timbunan.

Kekuatan gempa bumi dapat diukur melalui magnitudo gempa yang menggambarkan besarnya energi yang terlepas pada saat gempa bumi terjadi yang bersifat logaritmik. Umumnya magnitudo diukur berdasarkan amplitude dan periode fase gelombang tertentu atau satuan yang umum digunakan di Indonesia adalah skala Richter (*Richter Scale*).

Tabel 2. 2 Perbandingan Skala Richer dan Skala MMI

Skala Richer	Skala (MMI)	Keterangan
< 3,4	I	Sangat jarang/hampir tidak ada orang yang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf.
3,5	II	Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di Gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan.
4,2	III	Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di Gedung tinggi. Mobil yang parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat.
4,3 - 4,8	IV	Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, di luar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.
4,9 - 5,4	V	Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang-barang diatas meja akan terjatuh, plesteran tembok rusak, barang-barang yang tidak stabil akan roboh, pendulum jam dinding aan berhenti.
5,5	VI	Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak.
6,1	VII	Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada setiap bangunan yang desain konstruksinya buruk, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti.
6,2	VIII	Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang buruk, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecah dan lepas

		dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.
6,9	IX	Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa-pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.
7,0 - 7,9	X	Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, jembatan putus, rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.
>8	XI	Kerusakan total, Gerakan gempa terlihat bergelombang di atas tanah, benda-benda berterbangan ke udara.

Sumber: Triton PB 2009

2.2.4.2 Dampak Gempa Bumi

Menurut Anies (2018:18) bencana gempa bumi tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau bangunan, harta benda, dan jiwa manusia, tetapi juga kondisi kejiwaan bagi para korban. Akibat bencana tersebut, sebagian besar korban dapat mengalami penderitaan gangguan psikologis berupa trauma. Adapun beberapa akibat dari bencana gempa bumi adalah sebagai berikut:

1. Guncangan dan retakan tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
2. Longsor yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya, serta dapat menyebabkan sungai tersumbat.
3. Tsunami yang dapat menimbulkan gelombang tinggi di pantai.
4. Banjir disebabkan karena sungai tersumbat longsor atau jebolnya dam, tanggul atau waduk.
5. Kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan listrik dan/atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak.
6. Gunung Meletus, dimana gempa di atas 9 SR dapat memicu gunung meletus, terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi.

2.2.5 Tinjauan Tentang Praktik Pekerjaan Sosial

2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) dalam Dwi Heru Sukoco (2021:10) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut,

“pekerjaan sosial berkentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai”.

Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:3) pekerjaan sosial di dalam praktiknya merupakan salah satu profesi yang di dalamnya terdapat orang yang bekerja secara professional yang membantu orang mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, baik kesulitan dalam melaksanakan tuntutan peranan sosial, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, maupun dalam memenuhi hak dalam mendapatkan keadilan sosial yang disebut dengan pekerja sosial. Asosiasi pekerja-pekerja sosial (*The National Association of Social Workers*) menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah merupakan praktik pekerjaan yang menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan pelayanan sosial kepada klien baik klien individual, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi yang berlandaskan kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan ilmiah pekerjaan sosial, dan bekerja di organisasi-organisasi pelayanan manusia (*human service organization*) milik pemerintah, masyarakat, maupun praktik privat dalam bidang pekerjaannya.

Menurut Max Siporin (1975) dalam Dwi Heru Sukoco (2021:11) definisi dari pekerjaan sosial yaitu,

“pekerjaan sosial merupakan suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.”

Menurut Charles Zastrow (2008) dalam Dwi Heru Sukoco (2021:14) mendefinisikan pekerjaan sosial yaitu,

“pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”.

Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:12) mendefinisikan pekerjaan sosial yakni sebagai berikut

“pekerjaan sosial merupakan profesi yang berkecimpung di dalam kegiatan pertolongan kepada manusia yang ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat agar mereka dapat meningkat kemampuan berfungsi sosialnya dan mencapai tujuan hidupnya”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan professionela yang berlandaskan pada pengetahuan, nilai, dan keterampilan ilmiah yang diperoleh dari perguruan tinggi pekerjaan sosial untuk membantu orang, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat.

2.2.5.2 Karakteristik Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial berbeda dengan profesi lain seperti sosiologi, psikolofi, psikiatri, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Masyarakat umum sering bingung membedakan profesi pekerjaan sosial dengan penyedia layanan kemanusiaan yang lain. Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:23) terdapat karakteristik yang membedakan profesi pekerjaan sosial dengan profesi lain yaitu:

1. Fokus pekerjaan sosial adalah orang secara keseluruhan dan secara Fokus pekerjaan sosial adalah orang secara keseluruhan dan secara totalitas, yaitu yang mencakup faktor orang dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya.
2. Pekerjaan sosial menekankan kepada pentingnya keluarga di dalam membentuk dan mempengaruhi tingkah laku anggotanya.
3. Pekerja sosial mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang sumber-sumber masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan kliennya.
4. Penggunaan proses supervisi dapat memberikan petunjuk dan bimbingan bagi para pekerja soaial yang belum berpengalaman agar nantinya dapat tumbuh dan berkembang menjadi pekerja sosial yang berpengalaman.
5. Pekerjaan sosial mempunyai program pendidikan yang unik, karena memadukan antara pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperoleh di dalam kelas dengan pengalaman-pengalaman praktik di lapangan/masyarakat.
6. Pekerjaan sosial tradisional menekankan kepada tiga proses/metode dasar, yaitu *case work* (individu), *group work* (kelompok) dan *community organization/community development* (masyarakat).
7. Pekerjaan sosial mempunyai badan-badan profesional, seperti NASW (*The National Association of Social Workers*) dan CSWE (*The Council on Social Work Education*). Untuk Indonesia dikenal dengan IPSPI (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia).
8. Relasi sosial (*social relationship*) merupakan inti di dalam proses pekerjaan sosial.

9. Pekerjaan Sosial berorientasi kepada konsep-konsep psikiatrik dan lebih menekankan kepada pemahaman tentang orang.
10. Istilah sosial di dalam pekerjaan sosial ditekankan kepada *social interaction, social functioning, and malfunctioning*.
11. Pekerjaan sosial mengakui bahwa permasalahan sosial dan tingkah laku manusia berada di dalam institusi-institusi sosial manusia.
12. Pekerjaan sosial adalah membantu klien atau masyarakat agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri.
13. Pekerja sosial agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan dan mengembangkan pendekatan tim, sehingga mampu mengkoordinasi kegiatan dan pelayanan yang diberikan.

2.2.5.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar individu, sehingga individu tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya. Maka dari itu, tujuan dari pekerjaan sosial menurut Dwi Heru Sukoco (2021:31-34) adalah sebagai berikut.

1. Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya.
2. Membantu rang memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
3. Membuat organisasi lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada manusia.

4. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara individu dengan individu lain di lingkungan mereka
5. Mempengaruhi interaksi di antara organisasi-organisasi dan institusi-institusi serta mempengaruhi kebijakan lingkungan.

2.2.5.4 Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan salah satu konsep yang penting dalam profesi pekerjaan sosial karena pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan manusia yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan manusia sehingga mereka dapat meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial. Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:36) mengemukakan bahwa keberfungsian sosial mencakup semua cara kita menanggapi atau merespon tuntutan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud mencakup keluarga, teman sebaya, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai dimensi, diantaranya:

1. Keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan peran sosial. Peran sosial ini mencakup status sosial, interaksional, tuntutan atau harapan, tingkah laku, dan situasi sosial.
2. Keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kebutuhan manusia secara umum mencakup kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan sosial mengenai rasa memiliki dan cinta, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan fisiologis.

2.2.5.5 Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Usaha dalam memenuhi kebutuhan manusia berkaitan dengan sumber yang merupakan bahan dasar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Allan Pincus dan Anne Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (2021:51) mengklasifikasikan sumber ke dalam tiga golongan yaitu;

1. Sistem Sumber Informal atau Alamiah

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya, seperti pinjam uang.

2. Sistem sumber formal.

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

3. Sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program- program tenaga kerja, dan sebagainya.

Orang terkait dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum lainnya seperti: kepolisian, tempat-tempat rekreasi, dan pelayanan perumahan.

2.2.5.6 Tugas dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan sistem sumber. Adapun tugas dan fungsi dari pekerjaan sosial menurut Dwi Heru Sukoco (2021:59-62) adalah sebagai berikut.

1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
- 2) Pekerja sosial dapat memberikan pemahaman, dorongan, dan dukungan kepada orang-orang yang sedang dilanda krisis.
- 3) Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.
- 4) Pekerja sosial membantu orang untuk menguji beberapa alternatif pemecahan masalah dan memberikan informasi untuk membantu mengambil keputusan.
- 5) Pekerja sosial dapat mengkonfrontasikan orang dengan realitas situasi mereka, dengan cara memberikan informasi yang dapat mengganggu

keseimbangannya dan kemudian memotivasi mereka agar mau melaksanakan perubahan.

- 6) Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk membantu individu-individu untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber.

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan sistem sumber.
- 2) Pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, hak-hak mereka untuk memanfaatkannya dan menjelaskan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan.
- 3) Pekerja sosial dapat membantu orang untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam memanfaatkan sistem sumber di atas.
- 4) Pekerja sosial dapat membuat rujukan (*referral*) dan membantu orang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
- 5) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai advokat dari sebagian orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam memanfaatkan sumber maupun negosiasi terhadap suatu sistem.
- 6) Pekerja sosial yang memberikan informasi dan bertindak sebagai advokat dapat memberikan stimulasi kepada sistem-sistem sumber kemasyarakatan.
- 7) Pekerja sosial dapat membantu orang untuk bertindak sebagai sumber bagi orang lain melalui pembentukan sistem baru.

3. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- 1) Pekerja sosial dapat memberikan informasi kepada sistem sumber masyarakat untuk mengilustrasikan permasalahan yang disebabkan karena pelaksanaan prosedur pemberian pelayanan kepada konsumen.
- 2) Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan sebagai konsultan bagi sistem masyarakat dan dapat memberikan saran tentang metode pelayanan yang berbeda.
- 3) Pekerja sosial dapat mengkonsultasi sistem-sistem sumber informal untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang ada maupun yang baru dari sumber masyarakat.
- 4) Pekerja sosial dapat membawa orang ke dalam salah satu sistem sumber masyarakat atau mengkaitkan orang dengan beberapa sistem sumber masyarakat agar mereka dapat masuk pada perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga maupun individu.
- 5) Pekerja sosial dapat menengahi dan memecahkan konflik-konflik di antara sistem-sistem sumber informal, anggota-anggota organisasi maupun sistem-sistem sumber masyarakat.

4. Memberikan fasilitas interaksi di dalam sistem-sistem sumber

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial menyalurkan informasi dari satu bagian sistem kepada bagian sistem yang lainnya.

- 2) Pekerja sosial dapat juga memihak dan mengadvokasi (menjadi advokat) bagi kepentingan salah satu sistem yang kurang memiliki kekuatan.
- 3) Pekerja sosial dapat membantu mengorganisasi sub-sub/bagian-bagian sistem dan bertindak sebagai advokat bagi mereka dan bekerja untuk merubah bagian-bagian sistem tersebut.
- 4) Pekerja sosial dapat memberikan atau melatih keterampilan-keterampilan kepada anggota sistem agar mereka mampu melaksanakan peranannya di dalam sistem itu
- 5) Pekerja sosial dapat melibatkan anggota sistem dalam mendiagnosa permasalahan di antara mereka melalui pendiskusian kesulitan yang dialami atau menciptakan mekanisme umpan balik (*feedback*) dengan sistem itu sendiri.

5. Mempengaruhi kebijakan sosial.

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permasalahan dan kondisi yang perlu diubah melalui perubahan kebijakan sosial.
- 2) Pekerja sosial dapat mendorong badan-badan sosial di mana ia bekerja atau sistem-sistem sumber kemasyarakatan maupun organisasi-organisasi formal agar mengambil sikap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sekelompok warga masyarakat.
- 3) Pekerja sosial dapat membentuk sistem-sistem baru untuk melaksanakan perubahan kebijakan sosial.

- 4) Pekerja sosial dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sosial dan sebagai advokat untuk mengadakan perubahan kebijakan sosial.
- 5) Pekerja sosial dapat menyusun pelayanan, program, draf/konsep peraturan dan proposal guna mengubah kebijakan dan menciptakan pelayanan yang dibutuhkan.
- 6) Pekerja sosial di dalam bekerja sama dengan orang lain dapat menguji eksistensi hukum dan kebijakan-kebijakan administratif melalui keputusan pengadilan dalam memecahkan permasalahan yang spesifik.

2.2.5.7 Prinsip Pekerjaan Sosial

Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:119-121) menyatakan bahwa pekerjaan sosial yang melakukan pertolongan dan berinteraksi dengan kliennya harus didasarkan kepada prinsip-prinsip berikut.

1. Prinsip Penerimaan

Pekerja Sosial harus bisa menerima klien dengan semua kemampuan dan juga keterbatasan yang dimilikinya. Karena, penerimaan adalah inti dari semua hubungan pertolongan. Penerimaan yang tulus akan melahirkan respon positif dari klien yang membuat klien nyaman dan bisa lebih terbuka untuk menyampaikan masalahnya.

2. Prinsip Individualisasi

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang sama dalam aspek kehidupannya. Setiap individu berbeda dan setiap individu adalah seseorang yang unik dengan sifat dan juga kepribadiannya masing-masing sehingga

mereka tidak bisa disamakan satu sama lainnya. Peksos juga tidak diperbolehkan untuk membanding-bandingkan klien satu dengan klien lainnya.

3. Prinsip Kerahasiaan

Kerahasiaan disini yaitu penyampaian informasi rahasia klien yang diungkapkan dalam hubungan profesional saja. Pekerja sosial meyakinkan kepada klien bahwa seluruh informasi, bukti foto dan juga rekaman yang diberikan klien akan dijaga keahasiaannya dan disimpan dengan aman. Informasi akan dimunculkan hanya pada saat kegiatan *case conference* dan menggunakan inisial.

4. Prinsip Penentuan Nasib Klien Sendiri

Klien memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan klien diberikan kebebasan dalam membuat pilihan dan keputusannya sendiri. Pekerja sosial memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah lalu berdiskusi dengan klien dan pada akhirnya tetap klien tersebut lah yang menentukan dan memilih alternatif tersebut.

5. Prinsip Komunikasi

Komunikasi adalah proses yang terjadi secara dua arah. Harus adanya komunikasi yang baik antara klien dan juga pekerja sosial agar mendapat pemahaman yang tetap satu sama lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka atau menggunakan media komunikasi.

6. Prinsip Tidak Menghakimi

Pekerja sosial tidak boleh menyalahkan klien untuk masalah yang terjadi dan tidak juga memberikan tanggungjawab atas apa yang dilakukannya atau atas penderitaan yang dialaminya. Pekerja sosial disini hanya mengevaluasi terhadap

sikap dan tindakan klien. Pekerja sosial juga tidak boleh menghakimi klien seperti dengan menyebutkan bahwa anda baik dan tidak baik, atau layak dan tidak layak.

7. Prinsip Keterlibatan Emosi yang Dikendalikan

Pekerja sosial disini mencoba untuk memahami perasaan dan emosi klien tetapi tidak terlibat secara emosional terhadap masalahnya. Pekerja sosial tidak boleh larut dalam situasi yang dialami klien. Ada 3 komponen untuk respon emosional yang dikendalikan dengan situasi klien yaitu:

- 1) Kepekaan terhadap perasaan yang diungkapkan
- 2) Pemahaman berdasarkan pengetahuan tentang perilaku klien
- 3) Respon yang dipandu oleh pengetahuan dan tujuan.

8. Prinsip Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Prinsip ini artinya pekerja sosial sendiri harus mengetahui sejauh mana kekuatan dan keterbatasan dirinya untuk memecahkan masalah klien. Jika pekerja sosial merasa bahwa masalah klien diluar kemampuan dirinya maka pekerja sosial harus merujuk klien ke pihak yang lebih tepat sesuai dengan permasalahan klien.

2.2.5.8 Kerangka Pengetahuan, Nilai, dan Keterampilan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan pertolongan kepada klien, harus memiliki kerangka keterampilan yang meliputi kerangka pengetahuan pekerjaan sosial, kerangka nilai pekerjaan sosial, dan kerangka keterampilan pekerjaan sosial. Adapun kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial menurut Dwi Heru Sukoco (2021:101-110) adalah sebagai berikut.

1. Kerangka Pengetahuan Pekerjaan Sosial (*Body of Knowledge*)

Pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan kepada klien harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji kevaliditasannya. Pengetahuan pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang klien, baik klien sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat.
- 2) Pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*).
- 3) Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional, yang meliputi pengetahuan tentang diri sebagai pekerja sosial (*self*), profesi (*profession*), dan intervensi (*intervention*).

2. Kerangka Nilai Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai berikut ini, yaitu:

- 1) nilai pribadi pekerja sosial (*personal values*)
- 2) nilai profesi pekerjaan sosial (*profession values*)
- 3) nilai klien atau kelompok klien (*the values of a client or client group*)
- 4) nilai masyarakat (*the values of the larger society*)

3. Kerangka Keterampilan Pekerjaan Sosial

Keterampilan merupakan komponen penting di dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, sebab keterampilan pada prinsipnya merupakan alat untuk memadukan antara kerangka pengetahuan dengan kerangka nilai. Keterampilan-

keterampilan itu dipelajari dan diterapkan terhadap klien dan diawasi oleh supervisor dalam proses pertolongan. Adapun keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Keterampilan Pertolongan Dasar (*Basic Helping Skill*)
- 2) Keterampilan Kontak Awal (*Engagement Skill*)
- 3) Keterampilan Observasi (*Observation Skill*)
- 4) Keterampilan Berkomunikasi (*Communication Skill*)
- 5) Keterampilan Empati (*Empaty Skill*)

2.2.5.9 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan pertolongan harus menggunakan metode dan teknik yang tepat agar proses pertolongan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Menurut Dwi Heru Sukoco (2021:121) metode dan teknik yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut.

1. Metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*Social case work*)

Metode dalam pekerjaan sosial yang digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah penyesuaian sosial yang tidak dapat mereka atasi sendiri. Metode *Social Work* ini bertujuan membantu klien individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya saat ini maupun dimasa mendatang melalui kekuatannya sendiri. Adapun teknik yang dapat dilakukan dengan metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*social case work*) yaitu *small talk, ventilation, support, reassurance, confrontation, conflict, manipulation, universalization, advice and giving counselling, activities and program, logical discussion, reward and punishment.*

2. Metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*Social group work*)

Metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) sebagai salah satu metode pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sosial individu melalui pengalaman-pengalaman dalam kelompok yang disusun secara sadar dan bertujuan. Metode *group work* ini bertujuan untuk membantu atau menolong individu melalui kelompok. Adapun teknik yang digunakan dalam metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) yaitu konfrontasi, interpretasi, atribsi, *reinforcement*, dan pemberian model.

3. Metode pekerjaan sosial dengan masyarakat (*Community Organization /Community Development*)

Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organization*); yang bermakna mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam setting kondisi yang terus berubah. Dengan demikian inti pengertiannya adalah mendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraannya sendiri. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam metode pekerjaan sosial dengan masyarakat yaitu dengan kolaborasi atau mengadakan kerjasama dalam kegiatan masyarakat melalui implementasi dan pengembangan kapasitas, kampanye melalui edukasi, taktik persuasi, dan bantuan media masa, serta teknik kontes.

2.2.6 Tinjauan Tentang Pratik Pekerjaan Sosial di Bidang Kebencanaan

2.2.6.1 Pekerjaan Sosial dengan Bencana

Bencana yang terjadi baik bencana alam maupun nonalam dapat mengganggu kesejahteraan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pekerja

sosial harus mampu melaksanakan perannya. Adi Fahrudin (2003) dalam Dede Kuswanda (2009:131) profesi pekerjaan sosial sejak lama telah terlibat dalam kegiatan pertolongan bencana, baik melali pemberian bantuan, dan juga perhatian terhadap lingkungan fisik dimana orang tersebut berada.

Praktik pekerjaan sosial dalam bencana menekankan pada pentingnya interaksi orang dengan lingkungan sosialnya yang disesuaikan dengan status fungsi dan peran sosial baik secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat pada berbagai tahapan penanggulangan bencana. Prinsip pekerja sosial penanggulangan bencana ini dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kedudukan hkum dan kepastian hukum, kebersamana dan kelesteraian lingkungan hidup. Seperti pekerja sosial lainnya, Pekerja Sosial bidang Penanggulangan Bencana (PSPB) harus mematuhi semua standarisasi yang sudah ada dan memiliki pelatihan sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga berwenang yang dinaungi.

Menurut Tukino (2013) secara garis besar siklus penanggulangan bencana terdiri atas pra bencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana), pada saat terjadi bencana (tanggap darurat), dan setelah terjadi bencana (pemulihan). Pekerja sosial dapat berperan pada setiap tahap penanggulangan bencana seperti uraian berikut.

2.2.6.2 Praktik Pekerjaan Sosial Pada Saat Pra Bencana

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penyuluhan mengenai tingkat kerawanan dan risiko bencana.

Pada situasi tidak terdapat bencana, kegiatan peningkatan kapasitas mengenai risiko bencana untuk masyarakat sangat penting dalam mengatasi

risiko bencana yang mungkin terjadi. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah terutama dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sadar akan risiko bencana yang mengancamnya. Namun dengan berbagai pendekatan dan teknik yang dimiliki, pekerja sosial dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku agar masyarakat memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi ancaman bencana sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan nyawa dan harta benda.

2. Pemetaan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pemetaan kapasitas masyarakat ini amat penting untuk mengetahui risiko yang mengancam masyarakat serta kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Pemetaan kapasitas ini dapat berasal dari sumber-sumber lokal termasuk keterampilan, persediaan makanan, pilihan tempat tinggal darurat, organisasi sosial dan masyarakat, pemimpin lokal, sikap dan nilai budaya, serta sumber-sumber yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, pemetaan ini penting dalam merencanakan persiapan yang dapat mengurangi bahaya dalam mengidentifikasi rencana evakuasi bagi daerah yang berisiko.

3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal dengan membentuk kelompok penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berfungsi menjalankan dalam sistem pencegahan dan mitigasi, kedaruratan, serta pemulihan.

4. Melakukan advokasi kepada tataran kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan peranan-peranan di atas, pengurangan risiko bencana yang terbaik adalah pengurangan risiko bencana dengan berbasis masyarakat karena masyarakat mengetahui risiko-risiko yang akan dialami ketika terjadi bencana. Peran pekerja sosial adalah memfasilitasi terwujudnya suatu sistem pengurangan risiko bencana yang dibangun, digerakkan dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri (*community-based risk reduction*).

2.2.6.3 Praktik Pekerjaan Sosial Pada Saat Bencana

Pada saat terjadi bencana diperlukan tindakan yang mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan kesejahteraan para korban bencana. Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana dan pengungsi, terutama dalam hal:

1. Penanganan terhadap korban bencana yang mengalami trauma dengan mendirikan pusat-pusat pelayanan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial.
2. Penanganan terhadap kelompok rentan dengan memberikan perlindungan khusus, agar mereka tidak semakin parah dalam situasi pengungsian.
3. Penanganan terhadap masalah pendidikan anak dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah sebagai pengganti atau menunggu perbaikan fasilitas-fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, agar segera dapat digunakan.
4. Penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga yang mengalami kerusakan, hilangnya dukungan sosial, peran sosial yang tidak lagi

berfungsi normal, ikatan sosial yang melemah, serta ketidakpastian, dapat ditempuh dengan melakukan restorasi fungsi-fungsi tersebut.

Penggunaan multi pendekatan seperti; psikoanalisis, behavioral, kognitif, dan pendekatan lainnya dengan disertai berbagai teknik terpilih antara lain; konseling trauma, terapi bermain, terapi seni dan budaya, pendidikan di sekolah dan pendidikan agama, relaksasi, kelompok bantu diri, dan teknik lainnya, merupakan modalitas dalam praktik pekerjaan sosial. Namun demikian dalam bekerja di lapangan, pekerja sosial tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan profesi lainnya seperti; psikolog, sosiolog, antropolog, ahli komunikasi, dokter, dan lain-lain baik dari mulai perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi

2.2.6.4 Praktik Pekerjaan Sosial Pada Saat Pasca Bencana

Pasca bencana adalah kondisi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Pada tahap ini korban bencana tidak serta merta dapat hidup dalam situasi normal. Kegiatan pelayanan sosial bagi korban bencana pada pascabencana diarahkan pada rehabilitasi dengan dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta rekonstruksi upaya pembangunan kembali sarana/prasarana serta fasilitas umum yang rusak. Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana/pengungsi, terutama dalam hal:

1. Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga pengungsi korban bencana alam untuk meningkatkan kebefungsian sosial masyarakat serta meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar penyintas bencana.
2. Pelatihan penanganan masalah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bencana di daerah pasca bencana melalui pelatihan analisis masalah, menyusun

perencanaan, koordinasi, dan evaluasi untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada korban bencana, misalnya pelatihan kewirausahaan, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil, perdagangan, dan sebagainya. untuk meningkatkan kondisi ekonomi korban bencana pada masa pasca bencana.
4. Membantu para korban bencana yang tinggal di shelter pengungsian untuk mempersiapkan relokasi ke tempat baru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan resiliensi masyarakat yang tinggal di daerah rawan ancaman bencana gempa bumi sesar lembang, terutama dalam hal sebagai:

1. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial berperan dalam memberikan masukan dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya, risiko bencana terutama bencana gempa bumi akibat Sesar Lembang, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya resiliensi dalam menghadapi dan mengatasi ancaman bencana gempa bumi Sesar Lembang.

2. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial dapat menjembatani sistem kegiatan dengan system sumber yang dapat dimanfaatkan seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dapat memberikan motivasi dan penyuluhan yang baik

sehingga dapat memperkuat masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi Sesar Lembang.

3. Membantu dalam pencapaian tujuan (*Enabler*)

Pekerja sosial melakukan pemetaan masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana. Pemetaan ini dilakukan untuk menunjukkan risiko yang mengancam masyarakat dan kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi ancaman yang ada. Pemetaan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas dan sumber-sumber lokal termasuk keterampilan, persediaan makanan, pilihan tempat tinggal darurat, organisasi sosial dan masyarakat, organisasi bisnis, pemimpin lokal, sikap dan nilai budaya, dan sumber-sumber transportasi yang dapat membantu masyarakat mengatasi bencana.

4. Pemberi motivasi (motivator)

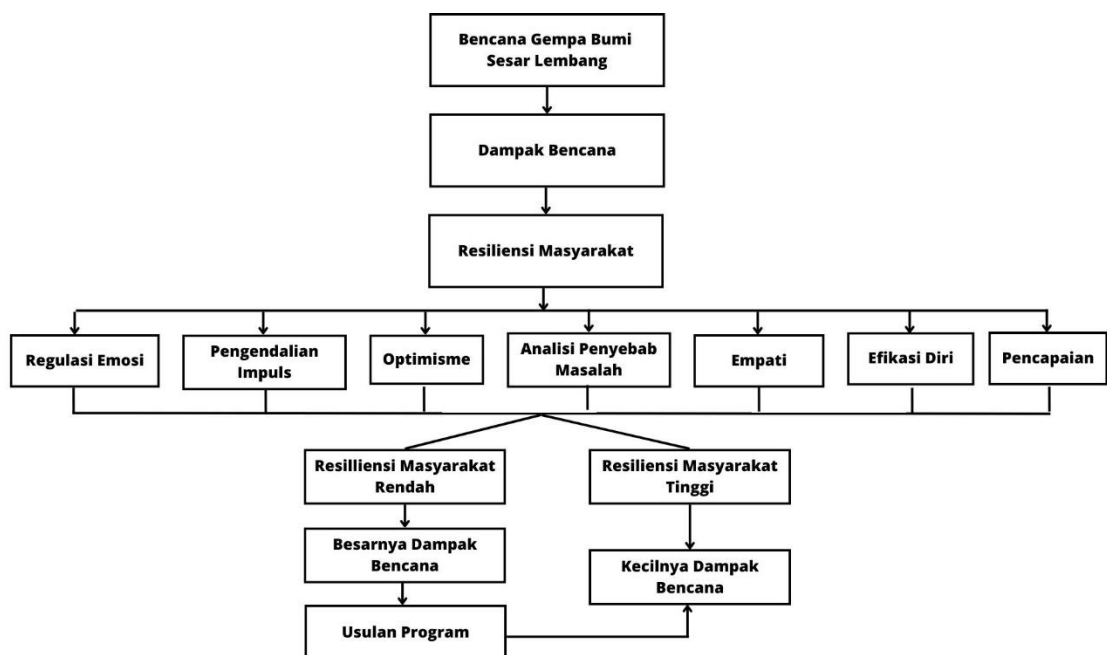
Pekerja sosial memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari ancaman bencana gempa bumi Sesar Lembang, seperti memberikan motivasi bahwa mereka mampu menghadapi ancaman bencana dan dapat pulih dengan baik.

5. Konselor

Pekerja sosial sebagai pembimbing masyarakat untuk mengarahkan bagaimana cara resiliensi yang tepat agar mereka memiliki dorongan semangat dan kemampuan yang besar untuk mengatasi bencana yang datang seperti ancaman bencana gempa bumi Sesar Lembang.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai landasan teoritis yang dijadikan dasar oleh penulis dalam menganalisis masalah penulisa. Kerangka berpikir disusun untuk memahami alur pemikiran keterkaitan teori resiliensi masyarakat dengan bencana gempa bumi sesar lembang. Kerangka berpikir penulisan ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penulisan

Skema kerangka berpikir tersebut menjelaskan bagaimana alur dari penulisan ini. Bencana gempa bumi masih menjadi ancaman bagi masyarakat yang berada di wilayah sesar lembang. Objek dari penulisan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi sesar lembang di Kampung Muri, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Resiliensi masyarakat Kampung Muril akan diukur melalui tujuh aspek resiliensi menurut

Reivich and Shatte (2002) yakni aspek regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian.

Hasil yang akan didapatkan dalam penulisan ini mengarah pada dua kemungkinan yaitu resiliensi masyarakat yang rendah atau resiliensi masyarakat yang tinggi. Apabila hasil penulisan menunjukkan resiliensi masyarakat rendah, maka akan menjadi usulan program untuk meningkatkan resiliensi yang telah dimiliki oleh masyarakat agar dapat mencapai tujuan resiliensi yang tinggi sehingga dampak dari bencana gempa bumi sesar lembang dapat berkurang.